PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna pemungutan retribusi izin trayek yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang luas dan bertanggungjawab;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a" maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek perlu dirubah dengan Peraturan Daerah yang baru;
c. bahwa penyesuaian dalam bentuk perubahan kenaikan Tarif Retribusi Izin Trayek perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1821);
2. Undang-undang Nomor 49 Drt. Tahun 1997 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Balik pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3629);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perorangan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah kabupaten Lampung Utara;
- i. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah;
- k. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas jasa kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran / penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat penyetoran lain yang ditetapkan Bupati;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Labih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib retribusi;

- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin trayek tertentu untuk angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau nama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transport dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 8

- 1) Standar tarif digolongkan standar jenis angkutan penumpang dan daya angkut.
- 2) Standar dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) masa retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Permohonan Baru
 - 1) Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp. 225.000,-
 - 2) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp. 275.000,-
 - 3) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp. 385.000,-
 - 4) Mobil Bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 425.000,-
 - 5) Angkutan khusus Rp. 230.000,-
 - b. Daftar Ulang
 - 1) Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp. 50.000,-
 - 2) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp. 60.000,-
 - 3) Mobil Bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp. 80.000,-
 - 4) Mobil Bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 100.000,-
 - 5) Angkutan khusus Rp. 50.000,-
 - c. Pemberian izin insidental dikenakan tariff retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- 1) Masa retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam upaya pemanfaatan/pengeluaran, wajib mendaftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan dipungut retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf "b".

BAB VI CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- 4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.